

# ISLAM DAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM (Belajar dari Desa Tombo, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Jawa Tengah)

Oleh: **Musoffa Basyir**

(IAIN Pekalongan, email: musoffabasyir@iainpekalongan.ac.id)

## Abstrak

Keberlimpahan sumberdaya alam yang dimiliki suatu desa tidak serta merta mengantarkan penduduk desa menjadi sejahtera. Hal ini disebabkan karena adanya tata kelola yang tidak berkeadilan dan berkelanjutan. Tulisan ini berusaha menjelaskan gerakan sosial yang terjadi di Desa Tombo, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang (Jawa Tengah) mengenai pengelolaan sumberdaya alam dan kaitannya dengan nilai-nilai Islam yang dijadikan sebagai dasar pergerakan. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah riset aksi partisipatif, yaitu riset yang mendorong masyarakat pedesaan untuk turut serta meningkatkan kemampuan dalam menganalisa keadaan mereka terhadap kehidupan dan kondisinya, agar mereka dapat membuat rencana dan tindakan sendiri. Doktrin-doktrin tasawuf yang selama ini dipahami sebagai doktrin yang mengarahkan seorang muslim hidup secara asketik ternyata memiliki dimensi kritis-transformatif yang dapat melandasi pengelolaan sumberdaya alam di Desa Tombo secara adil dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** desa, pengelolaan sumberdaya alam, Islam, tassawuf

## Pendahuluan

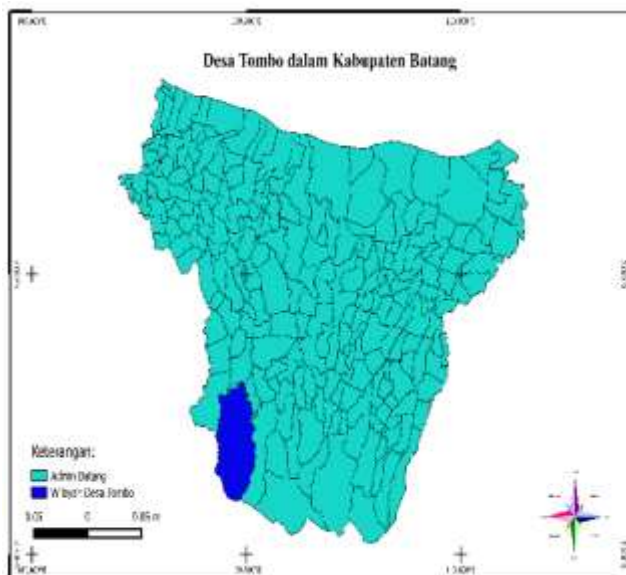
Malam itu, sekitar jam 20.15 di awal tahun 2015, sebanyak 11-an orang pemuda Desa Tombo berkumpul di sebuah rumah berlantai tanah liat untuk mendiskusikan potensi alam yang ada di desa. Dengan beralaskan terpal dan tikar mereka duduk membentuk formasi setengah lingkaran sambil berkerodong sarung menahan hawa dingin alam pegunungan. Waris (43 tahun) ditunjuk sebagai pemimpin diskusi. Semua peserta tampak bersemangat mengikuti jalannya diskusi, silih berganti menyatakan pendapat, berbagi informasi, dan saling bertanya. Dengan gayanya yang santai serta diselengi humor-humor *ala* pedesaan, Waris berhasil membuat peserta diskusi tidak beranjak sedikitpun dari tempat duduknya masing-masing hingga diskusi berakhir, sekitar jam 1 dini hari.

Ternyata, kegiatan diskusi semacam itu dilakukan oleh mereka hampir tiap malam, atau waktu-waktu lain yang lebih sesuai dengan kondisi. Tempat diskusi tak selalu di satu tempat, tapi berpindah-pindah, kadang di rumah-rumah, kadang pula di madrasah, pesantren, atau di kedai kopi. Mereka yang terlibat juga tak selalu sama jumlahnya, kadang hanya 3 orang, tapi lebih sering antara 6-9 orang. Pemimpin diskusi juga bisa siapa saja, giliran. Tapi, biasanya, orang-orang akan merasa senang jika diskusi dipimpin oleh K. Syakur atau Waris, karena keduanya dinilai paling mampu menguasai persoalan yang ada di desa serta paling terampil memimpin diskusi.

Mengenai maksud dari serangkaian diskusi yang selalu mereka lakukan ini, Kholid (35 tahun), menjelaskan:

“Kami ingin Desa Tombo menjadi desa yang mandiri dan sejahtera. Sekarang ini, kami sedang mengumpulkan data-data mengenai potensi sumberdaya alam beserta segala permasalahan yang melingkupinya. Dari sana nanti kami akan menentukan langkah-langkah apa yang harus kami lakukan agar masyarakat Desa Tombo hidupnya semakin sejahtera”.

Tahun 2015 memang merupakan tahun penting dimulainya berbagai gerakan “Desa Membangun” (bukan gerakan “Membangun Desa”) di banyak desa-desa di Indonesia, tak terkecuali di Desa Tombo. Penyebabnya, tiada lain karena adanya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberi peluang besar desa-desa untuk berdaulat atau mandiri. UU Desa memberi jaminan hukum kedudukan desa di dalam sistem NKRI, serta adanya pengakuan kewenangan desa oleh pemerintahan republik. Singkat kata, UU Desa telah memandatkan negara untuk memenuhi hak-hak desa yang selama ini terabaikan dan menjamin tata kelola pemerintahan desa yang berdaulat dan mandiri.



Kehadiran UU Desa sudah sewajarnya disambut secara antusias oleh masyarakat pedesaan karena dinilai memberi harapan baru. Harap diingat, dalam sejarah pembangunan Indonesia, desa tidak mendapat perhatian besar dari pemerintah. Bahkan, kebijakan pembangunan pedesaan di masa lalu telah menyebabkan desa-desa di Indonesia identik dengan keterbelakangan, kemiskinan dan ketidakberdayaan. Lebih memprihatinkan lagi karena kenyataan tersebut masih terus berlanjut hingga kini meski desa telah mendapat gelontoran dana desa yang sangat besar. Data yang dirilis Badan Pusat Statistik

(BPS) pada tanggal 16 Juli 2018 menyebutkan bahwa jumlah penduduk miskin per Maret 2018 sebesar 9,82% atau setara 25,95 juta orang, di mana 15,81 juta orang di antaranya adalah penduduk miskin yang ada di desa, dan 10,14 juta orang miskin kota.<sup>1</sup>

Kerja keras masyarakat desa yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani tak pernah terbayar lunas dengan yang namanya keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran. Tak heran jika kemudian para pemuda desa juga tidak lagi memiliki ketertarikan untuk bertani dan pekerjaan-pekerjaan lain yang berkaitan dengan dunia agraris. Mereka yang memiliki lahan sudah banyak pula yang membiarkan lahan-lahannya tak terurus atau dijual untuk menutupi biaya hidup dan hutang-hutang. Mereka lebih memilih pergi ke kota dan tidak sedikit yang akhirnya kalah karena tak berpendidikan dan tak punya koneksi.

Pada saat yang bersamaan, di desa terjadi pula inflasi yang disebabkan naiknya harga-harga bahan makanan sebagai faktor utama. Pada Juni 2017, inflasi pedesaan dikabarkan mencapai 0,23 persen. Kelompok barang yang menjadi penyumbang utama inflasi pedesaan adalah bahan makanan, perumahan, makanan jadi dan transportasi. Penyebabnya tiada lain karena desa telah dilanda konsumerisme. Desa tidak lagi menjadi pusat produksi hasil-hasil pertanian. Sebaliknya, desa telah bertransformasi menjadi pasar bagi barang konsumsi maupun bahan pangan yang diproduksi oleh pabrikan. Orang desa telah menjadi “manja” dan berubah menjadi konsumen fanatik dari barang industri yang mudah didapat. Padahal, sejatinya desa adalah sumber bahan pokok pangan dari tanaman rakyat yang bisa dinaikkan nilai tambahnya oleh teknologi pertanian.<sup>2</sup>

<sup>1</sup><https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/persentase-penduduk-miskin-maret-2018-turun-menjadi-9-82-persen.html>, diakses tanggal 02 Oktober 2018.

<sup>2</sup>Pril Huseno, “Inflasi Pedesaan dan Ironi Wajah Pedesaan” dalam <https://www.watutink.com/topik/ekonomika/Inflasi-Pedesaan-dan-Ironi-Wajah-Pedesaan>, diakses tanggal 02 Oktober 2018.

Tulisan ini berusaha menjelaskan usaha-usaha yang dilakukan masyarakat Desa Tombo, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang (Jawa Tengah) di dalam mengelola sumberdaya alam secara adil dan berkelanjutan. Usaha-usaha yang dilakukan mereka ini dapat dikatakan sebagai bentuk gerakan sosial yang menganut prinsip-prinsip kritis-transformatif untuk mengangkat harkat dan martabat kemanusiaan. Uniknyalagi, sumber nilai yang mereka gunakan adalah nilai-nilai yang bersumber dari ajaran-ajaran Islam. Hal ini bisa dipahami karena semua gerakan sosial yang terjadi di Desa Tombo rupanya digerakkan oleh aktor-aktor kunci yang memiliki pemahaman keislaman yang baik dan menempati kedudukan sentral dalam kehidupan keagamaan di desa. Lebih spesifik



lagi, pemahaman ajaran-ajaran Islam yang melandasi gerakan sosial mereka itu bersumber dari pengembangan pemikiran mengenai doktrin-doktrin yang ada dalam ilmu tasawuf. Dengan kata lain, tulisan ini pada akhirnya akan coba memberi ancaman adanya varian lain dalam tasawuf, yaitu tasawuf-transformatif yang kelahirannya muncul sebagai akibat dari adanya dialog doktrin-doktrin tasawuf dengan isu-isu pengelolaan sumberdaya alam di pedesaan.

### **Hutan Kaya, Rakyat Melarat**

Letak Desa Tombo berada di bagian selatan Kabupaten Batang (sekitar 27 km dari pusat kota), masuk wilayah Kecamatan Bandar. Desa ini berada pada ketinggian 650 s/d 1.900 mdpl dan dikelilingi dua buah sungai besar, yaitu Sungai Kupang dan Sungai Lohjahan. Sebagian besar atau sekitar  $\frac{3}{4}$  dari keseluruhan luas desa, wilayah Desa Tombo adalah kawasan hutan (hutan produksi dan lindung) yang merupakan wilayah KPH Pekalongan Barat, dan kawasan perkebunan yang dikelola oleh PTPN IX Persero Kebun Jolotigo (Afdeling Tombo). Wilayah sebelah selatan desa ini dibatasi oleh Gunung Sinduk yang merupakan hutan lindung yang dikenal dengan sebutan hutan Sutorenggo, tempat dimana sebaran berbagai satwa unik berada dan menjadikan Desa Tombo sebagai salah satu penyedia air dan sekaligus penyangga kehidupan di bawahnya.



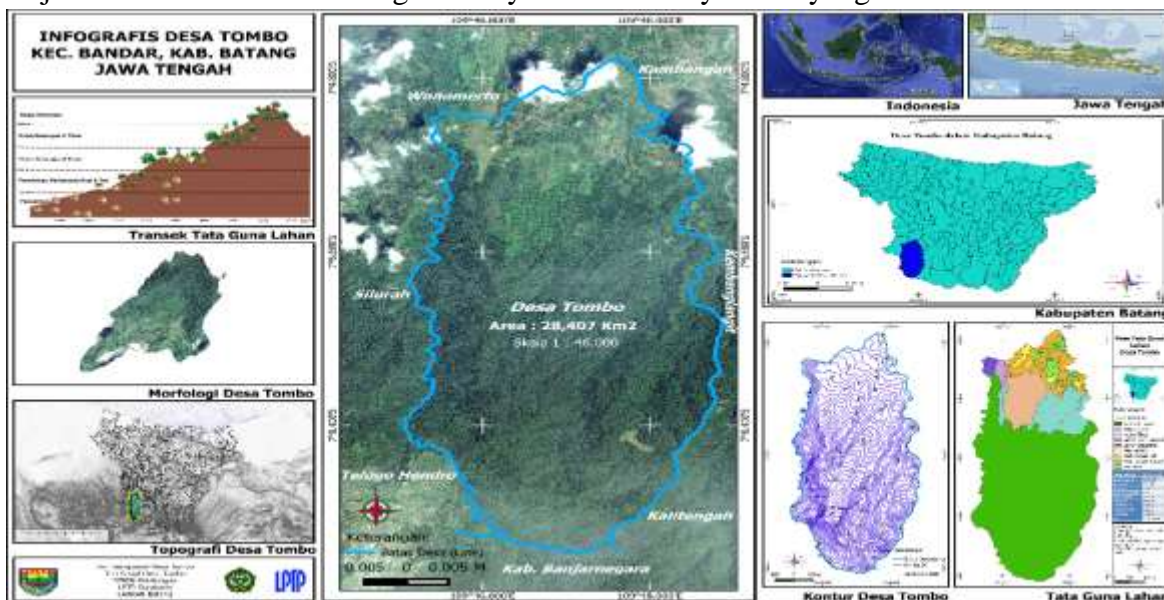
Jalan menuju ke desa ini sekarang sudah baik dan mulus, berbeda dengan sebelum tahun 2015. Tahun-tahun sebelum 2015 adalah tahun-tahun terberat bagi masyarakat desa atau bagi siapapun yang hendak pergi ke sana. Jalan yang harus dilalui sangat buruk, rusak berat, bergelombang dan terjal, banyak batu-batu tajam dan kerikil yang sangat tidak bersahabat untuk ban dan roda kendaraan. Seringkali ditemui banyak

kendaraan yang mogok atau tergelincir gagal melintasi jalan. Ditambah lagi kondisi jalan yang naik-turun dengan jurang di sisi-sinya mengikuti kontur desa yang berbentuk perbukitan. Tak jarang pula jatuh korban luka-luka. Menurut warga desa, rusaknya jalan ini diakibatkan karena menjadi perlintasan truk-truk bermuatan berat, mengangkut hasil-hasil hutan milik Perhutani dan hasil-hasil perkebunan milik PTPN. Tak pelak, pernah suatu ketika warga melakukan aksi penghadangan truk-truk agar tidak melintas. Palang pintu pun sempat dipasang beberapa tahun memblokir jalan utama desa yang menghubungkan langsung ke pusat kecamatan. Akibat protes yang terus menerus dilayangkan masyarakat baik kepada pemerintah desa, kecamatan maupun kabupaten, jalan desa pun akhirnya diperbaiki dengan kualitas yang sangat baik.

Begitu sampai di desa, mata siapapun akan langsung termanjakan oleh hamparan luas perkebunan teh dan kopi. Hawa dingin segera merayapi tubuh, menembus kulit, dan menusuk pori-pori. Tak hanya pemandangan alam, keramahan orang desa juga tak kalah elok dan menawan hati. Senyum mereka selalu mengembang. Tutar katanya sopan dan halus. Pilihan kata dan gaya bicaranya sederhana namun penuh makna. Tak ada tatapan yang menunjukkan kecurigaan, apalagi permusuhan.

Hamparan luas perkebunan teh itu milik PTPN. Hanya sebagian kecil saja perkebunan teh yang milik masyarakat. Lain halnya dengan kopi. Pohon-pohon kopi yang ada di Desa Tombo seluruhnya milik masyarakat. PTPN tak sedikit pun menanam kopi. Meski demikian, lahan-lahan tempat tumbuhnya teh dan kopi milik masyarakat itu juga bukan berada di lahan yang dimiliki masyarakat, melainkan di lahan-lahan milik Perhutani.<sup>3</sup> Kopi dan teh inilah yang menjadi bagian penting bagi kehidupan masyarakat Desa Tombo, di samping tanaman semusim lainnya yang ada di kawasan milik Perhutani. Kisahnya pun sangat panjang dan berliku untuk bisa dituturkan.

Menilik ke masa silam, masyarakat akan kembali teringat pada sejarah panjang nasib mereka yang sarat dengan kemelaratan dan ketidakadilan. Inilah hidup yang tidak sepatutnya terjadi sebab tidak selaras dengan kekayaan sumberdaya alam yang ada di desa.



<sup>3</sup>Teh ditanam PTPN tahun 96-an. Tetapi, sebelum PTPN membudidayakan teh, masyarakat lebih dulu menanamnya. Penanaman teh oleh masyarakat ini bukan di atas lahan milik masyarakat karena masyarakat memang tidak memiliki lahan (*landless*), melainkan di atas lahan-lahan milik Perhutani di bawah tegakan pinus. PTPN juga tercatat pernah membudidayakan kopi sebelum teh. Namun, kopi yang dikelola PTPN kemudian diganti dengan karet pada tahun 2005. Dengan kata lain, kopi yang kini ada di desa seluruhnya adalah kopi milik masyarakat dan berada di kawasan milik Perhutani, di bawah tegakan pohon produksi (pinus).



Faktor paling utama yang menyebabkan kemelaratan di desa adalah karena masyarakat desa tidak memiliki lahan. Tiga perempat wilayah desa dikelola oleh Perhutani dan PTPN. Hanya sedikit masyarakat yang benar-benar memiliki lahan pertanian atau perkebunan sendiri. Mayoritas penduduk desa masuk kategori *landless*, hanya sebagian kecil saja yang memilikinya, dan itu pun jumlahnya tidaklah luas.

Masyarakat pun akhirnya mengingat-ingat kembali sejarah desa mereka berkaitan dengan kepemilikan lahan. Sayangnya, tak ada yang tahu persis kapan desa ini mulai terbentuk. Tak ada catatan resmi. Demikian juga sumber-sumber lisan dari sesepuh desa, tak ada yang bisa memberi penjelasan yang memadai mengenai sejarah desa. Sejauh yang dapat dilacak, Baehaqie menulis:

“Pada awalnya Desa Tombo terdiri atas 9 (sembilan) pedukuhan, yaitu Siglengeng, Sirungrung, Gejungan, Siluwek, Tampingan, Bleder, Centuko, Seabagan, dan Tombo dengan pusat desa di Dukuh Siluwek. Pada tahun 1925-an sebagian dukuh mengalami perpindahan karena ada larangan dari Jawatan Kehutanan (sekarang Perum Perhutani) yang menjadi pengelola hutan pada saat itu. Sebagian masyarakat Siglengeng, Sirungrum, Gejungan, Siluwek pindah ke Kemejing (Desa Kambangan), sebagian pindah ke Pager Gunung, Karang Tengah (Wonomerto) dan Kali Tengah (Blado). Pada masa penjajahan Belanda, Desa Tombo pernah menjadi pusat Kecamatan Bandar. Lokasi bekas kota kecamatan itu sekarang menjadi kompleks perumahan Perum Perhutani di Dusun Tombo. Desa Tombo juga menjadi markas tentara RI sehingga menjadi salah satu tempat bersejarah di Kabupaten Batang”.<sup>4</sup>

Berdasarkan catatan Baehaqie di atas dapat diambil satu petunjuk bahwa sejak tahun 1925-an masyarakat Desa Tombo mengalami perlakuan yang sangat buruk oleh Perhutani, diusir dari hutan. Perlakuan ini sudah menjadi ciri khas model pembangunan ala penjajah yang tidak berperikemanusiaan. Rakyat dijajah dan diatur-atu untuk melanggengkan kepentingan penjajah. Di masa kemerdekaan, mental dan sistem kekuasaan model kolonial semacam itu belum sepenuhnya sirna, bahkan masih terasa hingga kini, terutama di desa-desa sekitar hutan, termasuk di Desa Tombo.

Singkat kata, masyarakat sama sekali tidak memiliki akses terhadap tanah atau hutan



yang dikuasai Perhutani, apalagi lahan milik PTPN. Padahal, tanah atau lahan bagi masyarakat desa adalah urat kehidupan, bahkan kehidupan itu sendiri. Hal ini bisa dipahami karena mereka hidup di pedesaan yang identik dengan dunia pertanian atau perkebunan, berbeda dengan orang kota yang hidupnya banyak mengandalkan dunia industri atau jasa. Ketiadaan tanah sama artinya dengan kematian. Hanya mereka yang

<sup>4</sup>Ahmad Baehaqie, “Penilaian Pembangunan Secara Partisipatif Di Desa Dan Kelurahan”, *TESIS*, Program Studi Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, 2004, hlm. 24.

memiliki lahan saja yang bisa bertahan. Celakanya, jenis-jenis pekerjaan yang bisa diakses masyarakat desa pun sangat terbatas karena minimnya keterampilan yang dituntut dunia industri. Karena itu, menjadi buruh tani atau perkebunan adalah pilihan yang paling realistis, meski hidup tak akan pernah sejahtera. Sebagai gambaran, upah dari petik teh di perkebunan teh milik PTPN pada tahun 2015 sebesar Rp. 350 per-kilogram. Dalam sehari, kemampuan seseorang memetik pucuk teh antara 15 kg hingga 35 kg, bergantung pada musim. Itu artinya, dalam sehari, para pemetik teh membawa uang antara Rp. 5.250 sampai Rp. 12.250.<sup>5</sup> Sementara di hutan, tak ada yang bisa dilakukan masyarakat, cukup sekadar mencari kayu bakar atau rumput untuk ternak.

Memang ada kebijakan Perhutani yang sedikit dapat membantu perbaikan taraf kehidupan masyarakat, yaitu diberikannya izin garap hutan produksi milik Perhutani yang pengelolaannya diatur sangat ketat oleh Perhutani serta sama sekali tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat. Lahan-lahan yang diizinkan itu adalah lahan-lahan Perhutani yang sedang mengalami masa transisi antara panen (penebangan pohon) dengan masa penanaman kembali. Tanaman yang ditanam pun adalah tanaman semusim dengan izin penggarapan hanya “seumur jagung”.

Ketiadaan tanah yang dimiliki oleh masyarakat dan ketiadaan akses masyarakat desa terhadap hutan milik Perhutani dan perkebunan milik PTPN inilah yang menjadi pangkal utama kemelaratan masyarakat Desa Tombo. Sumberdaya alam lainnya yang menjadi pangkal persoalan adalah persoalan air. Untuk kebutuhan sehari-hari pun masyarakat masih kesusahan. Banyaknya mata air yang ada di hutan tidak secara otomatis dapat mengalir ke penampungan, bak-bak mandi dan ember-ember penduduk karena tak ada jalur distribusi. Penyebabnya tiada lain karena adanya pembatasan oleh Perhutani dan ketidakmampuan masyarakat membuat jalur pipa karena himpitan ekonomi. Di musim kering, masyarakat terpaksa harus *ngangsu* ke sungai. Areal persawahan yang ada di desa pun mengandalkan air hujan.

Waris menjelaskan:

“Lahan yang dikuasai Perhutani itu sangat luas. Luasnya melebihi lahan yang dimiliki desa. Dalam mengelola lahan tersebut mereka tidak memperdulikan masyarakat. Seolah-olah, hutan milik Perhutani saja. Semua kebijakan sudah pasti menguntungkan mereka. Tanaman yang ditanam mereka secara lingkungan juga cenderung tidak ramah lingkungan. Kami tak pernah ditanya apalagi ikut menentukan jenis tanaman apa yang sebaiknya ditanam di hutan produksi. Pohon-pohon yang ditanam Perhutani mestinya adalah pohon-pohon yang bisa mendatangkan sumber-sumber mata air baru. Selain itu, kami juga dipaksa menanam di sela-sela hutan Pinus. Tentu saja kondisi tanah di situ tidak subur alias kering. Belum lagi jarak tanam yang terlalu dekat sehingga sinar matahari sulit masuk. Tanaman kami pun kurang menghasilkan sebab biaya yang harus kami keluarkan untuk penggarapan lahan dengan hasil yang didapat menjadi sangat tidak seimbang alias rugi.”

Tak heran, jika pada thun 2015, Bappeda Kabupaten Batang merilis bahwa kemiskinan di Desa Tombo adalah kemiskinan terparah yang ada di wilayah Kecamatan Bandar, seperti terlihat dalam tabel berikut:

---

<sup>5</sup>Upah petik teh tahun 2018 sebesar Rp. 500 per-kilogram

Desa/Kelurahan	Persentase Penduduk Miskin (%)	Kriteria
Tombo	45,49	Sangat rawan
Wonomerto	26,96	Rawan
Tumbrep	29,31	Rawan
Toso	31,28	Rawan
Sidayu	20,36	Agak rawan
Binangun	39,08	Sangat rawan
Wonodadi	28,09	Rawan
Pesalakan	17,81	Cukup tahan
Tambahrejo	19,80	Cukup tahan
Bandar	2,24	Sangat tahan
Wonokerto	10,82	Tahan
Candi	30,04	Rawan
Puncanggading	14,08	Tahan
Simpar	5,34	Sangat tahan
Batiombo	29,09	Rawan
Wonosegoro	8,58	Sangat tahan
Kluwih	29,01	Rawan

Sumber: BAPPEDA dan BPS Kabupaten Batang diolah.

“Hutan kaya rakyat melarat benar-benar dirasakan oleh masyarakat Desa Tombo. Ini semua tidak bisa dilepaskan dari pengelolaan hutan yang bersifat sentralistik dengan pola-pola pendekatan *top-down*, dan bergaya kolonial. Ini harus diakhiri karena nyata-nyata telah memarginalkan masyarakat”, kata Andi Yoga (22 tahun) mengungkapkan keprihatinan terhadap kemelaratan yang dialami masyarakat Desa Tombo.

### Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat

Keberlimpahan sumberdaya alam yang ada di Desa Tombo sudah selayaknya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Karena itu, agenda utama yang ditetapkan masyarakat adalah persoalan tata milik lahan. Usaha ke arah sana telah berhasil diraih masyarakat melalui program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).<sup>6</sup> Hal itu terjadi pada tahun 2001. Sajak saat itu, masyarakat berhasil mendapatkan akses untuk menggarap lahan milik Perhutani seluas 350-an ha. Areal hutan yang digarap petani adalah areal hutan produksi. Di areal inilah masyarakat menanam kopi, teh, buah-buahan dan tanaman semusim, hingga kini. Jadi, hamparan teh dan kopi yang ada di areal Perhutani yang ada sekarang ini tiada lain adalah buah dari hasil perjuangan masyarakat dalam hal tata milik lahan di desa. Dalam hal menanam kopi, masyarakat pun memperolehnya dengan cara yang tidak mudah. Saat itu, Perhutani tidak mengizinkan para petani penggarap menanam kopi di bawah tegakan pohon pinus. Perhutani lebih cenderung mengarahkan masyarakat hanya menanam tanaman semusim seperti jagung dan singkong. Berkat keberanian dan kegigihan yang disertai dengan kemampuan berargumentasi yang baik masyarakatlah akhirnya Perhutani pun menyetujui usulan masyarakat untuk menanam kopi di bawah tegakan pinus. Hal lain yang juga tidak mudah adalah soal jarak tanam pohon-pohon produksi Perhutani yang sangat rapat sehingga akan merugikan masyarakat.

<sup>6</sup>PHBM menjadi prioritas dalam Undang-Undang Perhutanan tahun 1999 pasal 3, yang menyediakan akses legal, keuangan, dan pasar kepada masyarakat lokal. PHBM menjadi bagian dari proses reformasi politik yang dimulai sejak tahun 1998. Tujuan PHBM adalah memberikan akses kepada masyarakat setempat terhadap sumber daya kehutanan dan lahan, yang pada akhirnya berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan di daerah.

Diperolehnya izin pengelolaan hutan oleh masyarakat tidak serta merta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Terbukti, hingga tahun 2015, angka kemiskinan di Desa Tombo masih menempati angka paling tinggi di antara desa-desa lain yang ada wilayah Kecamatan Bandar sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Ada dua persoalan utama di sini. *Pertama*, belum baiknya implementasi sistem bagi hasil. Menurut masyarakat, Perhutani dinilai tidak transparan dan sewenang-wenang. Masyarakat sama sekali tidak dilibatkan dalam perhitungan realisasi transaksi dan keuntungan hasil produksi pertanian atau perkebunan. Masyarakat hanya menerima keuntungan sesuai dengan keputusan yang dibuat sepihak oleh Perhutani.

*Kedua*, rendahnya kapasitas masyarakat dalam budidaya pertanian/perkebunan, dari hulu hingga hilir. Dilihat dari aspek produktivitas berbagai komoditas seperti kopi dan teh angkanya masih sangat rendah. Produktivitas kopi baru mencapai 400-500 kg perhektar, belum mencapai angka ideal 1 ton per hektar. Adapun teh kini sudah lama tidak produktif. Menurut Kimpul (petani senior) terdapat ratusan hektar lahan perkebunan teh milik rakyat yang saat ini sudah tidak lagi produktif atau dengan kata lain mangkrak. Persoalan-persoalan produktivitas ini sangat terkait dengan persoalan pengolahan lahan, pembibitan dan perawatan. Di aspek hilir, buruknya penanganan pasca panen ikut memperparah kualitas penghasilan petani. Dalam hal kopi, misalnya, masyarakat menggunakan sistem petik rontok saat panen. Padahal, sistem ini sangat tidak dianjurkan. Menurut beberapa orang Desa Tombo yang memiliki pengetahuan mengenai kopi, saat panen harusnya menggunakan sistem petik merah dan petik hijau. Tetapi, persoalannya tidak sesederhana itu. Masyarakat menerapkan sistem petik rontok saat panen karena terdesak oleh kebutuhan yang semakin menghimpit. Jika harus memilah petik merah dan hijau maka mereka akan mengalami pelambatan penghasilan sementara kebutuhan hidup sehari-hari tak bisa ditunda. Belum lagi, persoalan pasar yang belum bisa dikontrol oleh masyarakat. Harga kopi tak pernah stabil dan selalu ditentukan oleh pembeli. Harga *greand bean* kopi di Desa Tombo perkilonya mencapai antara Rp. 15.000 hingga 20.000.

Kedua persoalan ini menunjukkan secara jelas bahwa program PHBM di masa lalu masih menyisakan banyak persoalan karena tidak diiringi dengan perubahan mental, pemberian akses masyarakat terhadap sumber-sumber informasi dan ilmu pengetahuan, jaminan pasar yang berkeadilan, serta tidak tersedianya mekanisme penguatan di bidang permodalan bagi petani penggarap.<sup>7</sup> Di sisi yang lain juga masih ditemuinya kecenderungan kuat yang mengarah pada kegiatan eksploitasi sumber daya hutan dengan melihat hutan hanya sebagai sumber kayu (*timber oriented*), terjadinya KKN, yang kerap kali menimbulkan berbagai konflik horizontal (antar sesama masyarakat), maupun vertikal yakni antara masyarakat dengan badan otoritas pengelola hutan, terutama Perhutani.

Kehadiran UU Desa di tahun 2014 memberi harapan baru bagi masyarakat Desa Tombo karena UU ini memberi kewenangan otonomi yang besar kepada desa untuk mengelola segala sumberdaya yang ada di desa untuk kesejahteraan masyarakat. Harapan baru ini kemudian bertemu dengan pengalaman masa lalu yang begitu pahit.

Adanya pertemuan masa depan dan masa lalu inilah yang melandasi progresivitas gerakan sosial di Desa Tombo. Dalam sebuah rapat yang terjadi di bulan Mei Tahun 2015, masyarakat bersepakat untuk memahami UU Desa tidak sebatas pada persoalan besarnya gelontoran dana desa yang bakal mengalir ke desa. Hal itu diyakini bukan sesuatu yang substantif, melainkan hanya instrumental saja dalam memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Penyelesaian masalah kemiskinan di pedesaan diyakini tidak akan berhasil jika hanya

---

<sup>7</sup>Mengenai permodalan, masyarakat banyak yang terlilit hutang pada rentenir. Di Desa Tombo, rentenir sangat menggurita. Di desa ini diketahui ada 1 orang rentenir yang memiliki omzet milyaran rupiah dalam setiap bulannya. Ia memiliki armada sepeda motor sekitar 50-an armada.



terfokus pada persoalan dana *an sich*. Apalagi, mental koruptif juga telah menjangkiti para pelaksana pembangunan di pedesaan. Mengenai hal ini, K. Syakur (pengasuh PP. Al-Fadlu dan guru MTs Al-Ishlah, 40 tahun) memberi penjelasan sebagai berikut:

“UU Desa janganlah dipandang dari segi desa akan mendapat dana besar. Ini berbahaya. Bisa jadi, ini semacam jebakan *batman* untuk aparat desa. Mereka belum siap mengelola dana sebesar itu. Mental mereka sudah rusak. Kalau pegang uang banyak maka yang muncul adalah keserakah dan lupa bahwa itu adalah uang rakyat. Akhirnya dikorupsi. Jadi, lebih baik kita bicara yang lebih substantif, antara lain menyiapkan sistem perencanaan yang bagus agar desa kita lebih tertata lagi ke depannya. Tetapi, jangan lupa, dana desa yang sudah kadung diterima pun harus terus diawasi”.

“Perencanaan Pembangunan Desa”, itulah nama agenda utama yang disepakati masyarakat Desa Tombo saat itu. Agenda ini diyakini sebagai titik pangkal dalam rangka menyongsong era baru desa pasca diberlakukannya UU Desa tahun 2014. Gayung pun bersambut. Setelah diadakan serangkaian pertemuan dengan unsur-unsur kelembagaan yang ada di desa, masyarakat dan pemerintah Desa Tombo sepakat untuk mengadakan perencanaan pembangunan desa yang lebih sistematis dan komprehensif lagi. Mustajab, lurah Desa Tombo menyatakan:

“Perencanaan yang matang sangat dibutuhkan untuk kemajuan desa kita. Sudah sepatutnya kita memiliki sistem perencanaan yang bisa mensejahterakan masyarakat yang ukuran-ukurannya jelas. Jangan seperti selama ini. Pembangunan di desa berjalan secara alami, tanpa perencanaan yang matang. RPJMDes yang sudah ada perlu direvisi sesuai dengan semangat UU Desa yang baru”.

Untuk bisa membuat dokumen perencanaan yang baik maka semua pihak bersepakat untuk melakukan kegiatan pemetaan secara cermat dan detil. Menurut mereka, pemetaan sangat penting dilakukan karena dari sanalah kebijakan-kebijakan pembangunan desa harusnya disusun. Karena itu, pemetaan yang akan dilakukan tersebut harus mampu memotret kondisi desa secara utuh, riil dan valid. Dengan cara seperti itu, kebijakan pembangunan dinilai akan lebih tepat sasaran dan tepat mutu. Menurut mereka, era perencanaan desa yang hanya berdasarkan pada asumsi atau perkiraan harus diakhiri.

Diskusi pun segera mereka gelar untuk menyusun desain pemetaan. Waktu yang dibutuhkan untuk merumuskan kerangka kerja pemetaan cukup lama dan panjang. Sekitar satu bulan penuh mereka mendiskusikan kerangka kerja lengkap dengan berbagai instrumen pemetaan yang dibutuhkan.

Mereka memilih pendekatan *sustainable livelihood* sebagai kerangka kerja pemetaan dan “gerakan desa membangun”. Pendekatan ini mereka gunakan untuk membedah fenomena kemiskinan di desa dan rencana pembangunan ke depan. Menurut mereka, pemiskinan yang terus menerus direproduksi di desa ternyata disebabkan oleh diputusnya masyarakat dari aset-aset penghidupan mereka. Pemutusan ini sifatnya struktural. Inilah yang menurut mereka bahwa kemiskinan di desa lebih disebabkan karena persoalan-persoalan struktural. Artinya, kemiskinan lebih disebabkan karena adanya sistem-sistem tata kelola dan kebijakan yang tidak adil. Dalam pandangan mereka, tidak dimilikinya akses kepada hutan dan sumberdaya alam lain oleh masyarakat merupakan fakta yang tidak bisa dibantah telah melahirkan kemelaratan penduduk Desa Tombo selama ini. Lebih jauh dikatakan, bahwa pemutusan masyarakat terhadap aset-aset vital yang mereka miliki itu

bukan saja melahirkan kerentanan baru dan bahkan kemiskinan yang berkepanjangan melainkan juga tidak dapat menjamin pembangunan yang berkelanjutan.

Aset-aset masyarakat yang dipetakan meliputi lima aset utama, yaitu *human capital* (sumberdaya manusia), *environmental capital* (sumberdaya alam), *financial capital* (sumberdaya finansial), *social capital* (sumberdaya sosial), dan *physical capital* (sumberdaya infrastruktur atau fisik). Kelima aset masyarakat ini bisa dikatakan adalah ruang kehidupan masyarakat yang jika tidak dikelola dengan baik maka tidak hanya akan membahayakan kelompoknya melainkan juga generasi dan kelompok lain.

Kelima aset tersebut mereka jaring baik berupa data spasial maupun sosial. Data spasial dimaksud mereka di sini adalah data-data mengenai kawasan desa berupa batas desa, tata penggunaan lahan (hutan, perkebunan, ladang, sawah, pemukiman, fasilitas umum, dan lain-lain), sungai, jalan, jaringan air, mata air, prasarana air, topografi, kontur, dan lain-lain.

Adapun data sosial yang dimaksud dalam buku ini adalah data-data mengenai kondisi setiap kepala keluarga, baik itu kepala keluarga laki-laki maupun perempuan, beserta anggota-anggotanya. Adapun variabel yang tercakup dalam pemetaan ini setidaknya meliputi 10 masalah pokok. *Pertama*, ancaman bencana rutin, meliputi: (1) bencana yang dihadapi tiap keluarga dan usaha mengurangi ancaman; (2) riwayat bencana desa. *Kedua*, demografis kepala keluarga dan tiap anggota keluarga, meliputi: (1) informasi kependudukan (nama, Nomor Induk Kependudukan, tahun lahir, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, agama, golongan darah); (2) pendapatan dan kepemilikan kendaraan; (3) lama menetap dan merantau/tidak. *Ketiga*, pemukiman warga, meliputi: (1) jumlah jiwa dalam rumah dan kondisi rumah



setiap keluarga (atap, dinding, lantai, kepemilikan, tahun dibangun); (2) sanitasi (WC, kamar mandi, saluran pembuangan). *Keempat*, air bersih, meliputi sumber air bersih dan penggunaan untuk keperluan rumah tangga; *Kelima*, pangan keluarga, meliputi: (1) pola konsumsi; (2) sumber konsumsi pangan; (3) ketersediaan cadangan pangan; (4) energi untuk memasak (kayu, minyak tanah, gas); *Keenam*, kondisi kesehatan dan kebersihan keluarga, meliputi: (1) jumlah anggota keluarga berisiko (bayi, balita, ibu hamil, lansia, difabel); (2) penyakit yang diderita, layanan kesehatan dan akses terhadap perlindungan kesehatan (asuransi, Jamkesmas, Jamkesda, BPJS); (3) pola hidup bersih dan sehat bagi anak dan balita; (4) pengolahan sampah keluarga; perilaku ramah-lingkungan/tidak jelas akan terlihat. *Ketujuh*, sumber penghidupan tiap keluarga, meliputi: (1) jenis sumber penghidupan (pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan); (2) aset, kepemilikan dan cara pengolahannya; (3) cara pengolahan akan menunjukkan apakah ramah-lingkungan atau tidak; *Kedelapan*, belanja rumah tangga tiap keluarga, meliputi: (1) pangan; (2) energi; (3) pendidikan; (4) kesehatan dan kebersihan pribadi; (5) sosial (iuran kampung, pulsa HP, hiburan, dll); (6) pertanian (pupuk, benih, dll); (7) perkebunan (pupuk, benih, dll). *Kesembilan*, ekosistem desa, meliputi: (1) batas desa; (2) tata penggunaan lahan (hutan, perkebunan, ladang, sawah, pemukiman, dll); (3) sungai, mata air, jaringan air, prasarana air, jalan, dll; (4) topografi desa. *Kesepuluh*, kelembagaan desa.

Data-data sosial diperoleh dengan cara sensus di setiap rumah tangga. Adapun data-data spasial diperoleh dengan cara-cara sebagai berikut. *Pertama*, menggali informasi mengenai batas desa dengan melakukan penitikan dengan GPS pada batas desa yang mudah dijangkau. *Kedua*, men-*download* peta raster desa (peta citra dari satelit) untuk visualisasi pemetaan desa kepada masyarakat. *Ketiga*, pemasangan ID rumah secara menyeluruh. *Keempat*, *tracking* atau penelusuran batas desa/dusun dengan menggunakan GPS. *Kelima*, *ploting* atau memberikan tanda titik koordinat pada suatu rumah, ataupun fasilitas umum dengan GPS. *Keenam*, penomoran *waypoint* dalam GPS yang dicocokkan dengan kode ID bangunan rumah. *Ketujuh*, membuat sketsa wilayah desa secara manual. *Kedelapan*, pemotretan semua rumah. *Kesembilan*, menginput dan mengolah data ke dalam program Q-gis, diawali dengan memasukkan hasil *tracking* dan *ploting* GPS. *Kesepuluh*, membuat *file* SHP meliputi rumah, tataguna lahan, sungai, jalan, dan fasilitas umum. *Kesebelas*, memasukkan data rumah tangga ke dalam *file* SHP. Hal ini dilakukan agar peta yang dibuat mempunyai data yang lengkap tentang kondisi di setiap rumah tangga.

Baik data spasial maupun sosial keduanya diseleksi melalui tahap *cleaning* dan verifikasi data yang cermat dan akurat. Proses paling rumit pada tahap ini adalah menyamakan kembali ukuran luasan dan berat. Perlu diketahui, di masyarakat terdapat



banyak ukuran luasan, seperti hektar, bahu, bata, iring, dan lain-lain. Dalam hal ukuran berat ditemukan adanya perbedaan ukuran berat seperti sekilo, sak-dapur, sak-pikul, sak-keranjang, dan lain-lain. Perbedaan penggunaan ukuran luasan dan berat tersebut tentu harus dikonversi ke dalam satuan ukuran luas dan berat yang standar sesuai yang disepakati, yang penggunaannya harus dilakukan secara cermat dan akurat untuk berbagai produk pertanian dan

perkebunan yang tentu berbeda antara satu dan lainnya.

Input data sosial dilakukan dengan cara memasukkan hasil wawancara (sensus) ke dalam komputer, menggunakan program MS Acces dan Microsoft Excel. Setelah kedua kategori data tersebut dipastikan benar dan akurat maka langkah berikutnya adalah mengintegrasikannya ke dalam program Q-Gis.

Semua produk pemetaan yang dihasilkan dinamai oleh mereka dengan nama “Database Desa” dan “Sistem Informasi Desa” (SID). Beberapa data dan informasi sudah mereka terbitkan dalam bentuk buku, dengan judul “Desa Tombo dalam Angka Tahun 2015”. Yang menarik, semua proses atau langkah-langkah pemetaan tersebut dilakukan oleh sebuah tim yang dibentuk desa, yang kesemuanya adalah para pemuda. Mereka melakukannya di tengah-tengah kesibukan, baik sehabis kerja maupun sepulang sekolah.

Ada banyak hal menarik yang terkait dengan pelaksanaan pemetaan. Saat akan melakukan pemetaan spasial kawasan perhutanan, tim kesulitan mendapatkan data sekunder, yaitu berupa batas-batas lahan yang dimiliki Perhutani. Tentu saja, pemetaan kawasan hutan harus dilakukan secara cermat karena terkait dengan kepentingan Perhutani. Jangan sampai salah melakukan pemetaan. Tujuan diadakannya kegiatan pemetaan kawasan hutan sendiri adalah mengetahui batas-batas wilayah hutan (*ploting* dan *tracking*) dengan

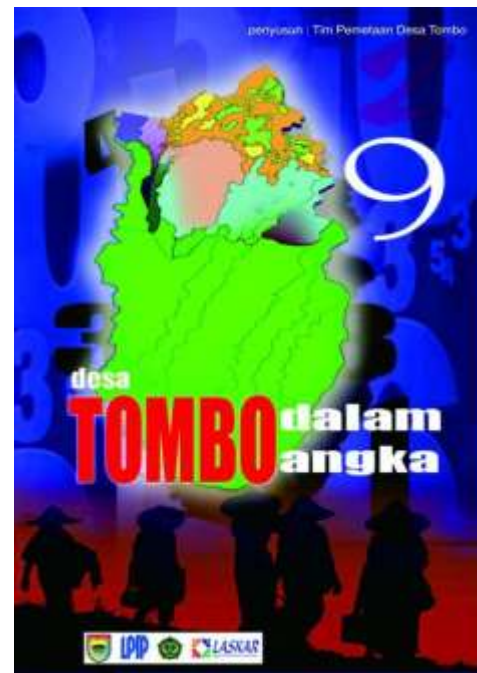


menggunakan GPS. Itu artinya, seluruh kawasan Perhutanan harus mereka telusuri dengan cara berjalan kaki.

Pemilik peta hutan tentu saja adalah Perhutani. Surat pun dilayangkan ke Perhutani dengan tujuan agar mereka memberikan peta hutan dan ikut terlibat dalam kegiatan pemetaan. Mereka pun bersedia setelah mendapat penjelasan dan konfirmasi dari kepala desa. Saat pemetaan dilaksanakan, ada beberapa petugas dari Perhutani yang turut serta. Tim desa sudah siap dengan segala perbekalan karena kegiatan pemetaan diperkirakan akan memakan waktu sekitar 3 hari. Lain halnya dengan tim dari Perhutani, mereka hanya mengenakan pakaian kantor seperti biasanya tanpa membawa perbekalan dan perlengkapan lain layaknya akan menelusuri hutan.

Singkat cerita, rombongan telah menempuh perjalanan setengah hari dengan berjalan kaki. Posisi saat sudah berada di dalam hutan. Tiba-tiba, rombongan Perhutani memutuskan untuk pulang karena hari akan segera sore dan menjadi gelap. Diskusi kecil sedikit “panas” pun sempat terjadi antara tim desa dengan rombongan Perhutani. Beberapa lama kemudian, akhirnya, tim desa mempersilahkan rombongan Perhutani untuk kembali pulang. Syaratnya Perhutani harus memberikan peta hutan kepada tim desa agar tidak tersesat di hutan saat melakukan penelusuran wilayah hutan. Penolakan pun disampaikan tim Perhutani. Maklum saja, peta itu adalah “peta keramat” yang sedari zaman Belanda tak pernah sedikit pun lepas dari tangan mereka. Rakyat tak seharusnya tahu peta hutan. Namun, dengan negosiasi yang cukup alot, peta itu pun akhirnya diberikan juga kepada tim desa.

“Kami sengaja mengajak mereka masuk hutan dan ikut pemetaan, dengan harapan agar peta itu bisa diberikan kepada kami. Peta itu dari dulu kami pinjam tapi tak pernah diizinkan. Kami sudah mengira bahwa mereka akan pulang menjelang sore. Pasti mereka tak akan ikut pemetaan hingga 3 hari. Karena itu kami biarkan mereka masuk hutan. Prediksi

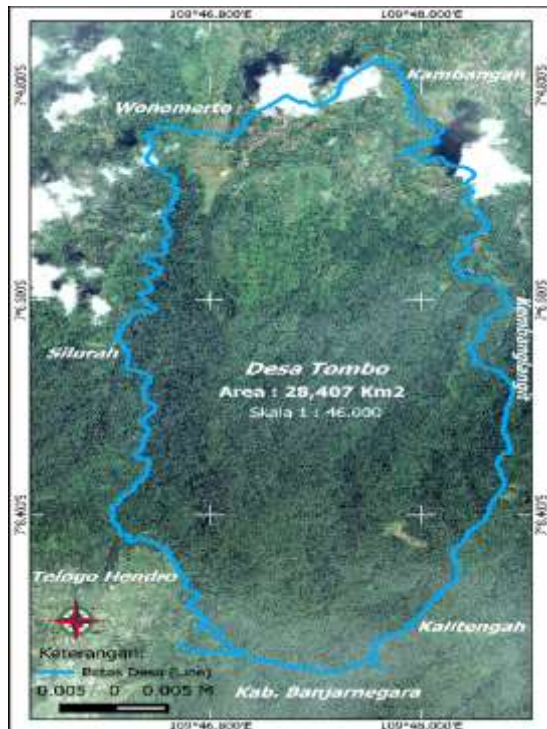


kami pun benar adanya. Dengan strategi memelas karena takut kesasar, kami berhasil merebut peta hutan dari tangan mereka”, ujar Waris sambil tersenyum.

Di dalam hutan, pada hari kedua, tim pemetaan spasial Desa Tombo menemukan adanya tanda-tanda bekas perkampungan. Tanda-tanda itu antara lain: terdapat areal yang cukup luas dengan kontur tanah yang relatif rata, terdapat beberapa bekas selokan, ada gundukan-gundukan tanah yang diduga adalah pekuburan, adanya jenis-jenis tanaman yang biasa ditemui di per-

kampungan, dan tanda-tanda lain yang mengarah pada dugaan kuat bahwa pernah ada perkampungan di dalam hutan.

Sepulang dari pemetaan, mereka menceritakan kejadian ini kepada sesepuh desa. Sayang sekali, tak ada satu pun yang mengetahuinya. Hingga kini, misteri tersebut belum terungkap. Masyarakat menduga, jika benar itu adalah bekas perkampungan maka dapat dipastikan bahwa keberadaan masyarakat Desa Tombo jauh lebih tua daripada Belanda di dalam menempati kawasan. Itu Artinya, hutan dengan segala kekayaannya adalah milik para



leluhur mereka, bukan milik Belanda yang kemudian dilanjutkan Perhutani. Mereka pun kemudian menduga-duga bahwa masyarakat Desa Tombo adalah masyarakat yang terbuang dari “rumahnya” sendiri.

Mengenai batas desa tak kalah menariknya. Berdasarkan hasil pemetaan spasial dengan menggunakan citra satelit dan GPS yang kemudian diolah dalam Q-GIS, diperoleh data mengenai luasan batas Desa Tombo sebanyak 2.800 Ha (28.398 km<sup>2</sup>). Posisinya berada di -7° 07" LU – 7° 14" LS dan 109° 76" BB – 109° 81" BT. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Silurah (Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang), sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kambangalit (Kecamatan Blado, Kabupaten Batang), sebelah Utara berbatasan dengan Desa Wonomerto (Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang), dan sebelah Selatan berbatasan dengan tiga desa sekaligus, yaitu: 1) Desa

Kembangalit (Kecamatan Blado, Kabupaten Batang); 2) Desa Gerlang (Kecamatan Blado, Kabupaten Batang); dan 3) Desa Telogo Hendro (Kecamatan Petung Kriyono Kabupaten Pekalongan).

Luasan yang ditemukan tersebut berbeda dengan yang selama ini diketahui masyarakat desa melalui informasi-informasi resmi. Versi pemerintah desa menyebutkan bahwa luas Desa Tombo seluas 800 ha, sementara versi KPH Pekalongan Selatan menyebutkan 1.400 ha. Luas wilayah versi tim pemetaan spasial yang mencapai 2.800 Ha ini tentu merupakan temuan yang luar biasa mengingat terdapat perbedaan yang sangat besar dengan luasan dari kedua versi pemerintah dan Perhutani. Jika luasan wilayah Desa Tombo versi hasil pemetaan yang diakui maka bisa dipastikan bahwa hal itu akan lebih dapat menopang kehidupan masyarakat desa dalam mencapai kesejahteraan. Kendati hasil temuan tim pemetaan geo-spasial Desa Tombo tentang luasan desa ini belum secara resmi diakui pemerintah, tetapi luasan desa tersebut telah mendapat pengakuan secara massif dari masyarakat dan pemerintah desa. Dengan ditemukannya luasan desa hasil pemetaan terakhir ini maka bisa dikatakan Desa Tombo adalah desa yang memiliki batas desa paling luas di wilayah Kabupaten Batang.

Selain luasan, tim pemetaan spasial juga menemukan berbagai potensi sumberdaya alam yang ada di dalam batas-batas desa yang mencapai 2.800 ha, baik berupa sumber mata air, keragaman vegetasi hayati, aneka satwa, tambang, dan lain-lain. Keindahan alam pedesaan yang tersusun dari perkebunan, bukit dan pegunungan juga tidak lepas dari perhatian tim pemetaan. Menurut tim pemetaan, Desa Tombo ternyata juga menyimpan banyak potensi wisata, antara lain: kawasan puncak, wisata teh, wisata kopi, pengamatan



burung dan satwa liar, *camping ground*, curug Semar dan Sekacir, Jembatan Merah, Nangka Wasi, Jaleho, dan lain-lain.

Mengenai adanya potensi wisata ini ternyata hal itu bukan isapan jempol atau khayalan di siang bolong. Contohnya adalah wisata rumah pohon yang dikembangkan para pemuda desa. Tiba-tiba saja rumah pohon Desa Tombo menjadi destinasi wisata favorit masyarakat Batang dan sekitarnya. Bahkan, di musim libur panjang seperti lebaran, pengunjung wisata rumah pohon bisa berasal dari berbagai kota baik yang ada di Jawa Tengah maupun lainnya. Kehadiran wisata rumah pohon Desa Tombo juga menjadi pionir bagi lahirnya berbagai destinasi wisata alam lainnya di Kabupaten Batang, seperti Wisata Alam Sikembang yang ada di Kembang Langit, Wisata Curug Genting yang ada di Desa Bawang Blado, Wisata Alam Sri Gunung Banyuputih, dan lain-lain.

Ide dasarnya sangat sederhana, yaitu pemanfaatan keindahan alam berupa area perbukitan, pemandangan gunung yang menjulang, jurang yang curam, serta pepohonan lebat yang mengelilingi desa. Pemandangan alam yang hijau dan ditambah birunya langit serta suara aliran sungai yang terdengar deras dari bawah dasar jurang akan membuat suasana semakin sejuk sehingga pengunjung akan betah berlama-lama di kawasan wisata rumah pohon desa Tombo.



Wisata rumah pohon desa Tombo dimulai pada pertengahan tahun 2015, bersamaan dengan pelaksanaan pemetaan spasial dan sosial. Pemicunya sepele, sama sekali tak diduga. Saat itu, ada seorang pemuda desa yang ingin memberi kejutan kepada pasangannya sebagai hadiah ulang tahun. Demi memberi kesan mendalam terhadap pacarnya itu, sang pemuda pun berinisiatif membuat semacam “titian” yang bisa digunakan untuk melihat keindahan alam di atas sebatang pohon besar yang ada di areal Perhutani tersebut. Si pemuda terinspirasi oleh suatu adegan film yang menampilkan rumah di atas pohon untuk menikmati keindahan alam bersama sang kekasih. Kejadian ini rupanya kemudian diketahui pemuda-pemuda lainnya. Mereka pun lalu mendatangi lokasi ingin membuktikan keindahan alam jika dilihat dari atas pohon. Saat itu musim selfie, dan para pemuda juga sudah banyak yang aktif bermedia sosial semacam facebook. Kontan saja, berita pun dengan cepat tersebar ke seantero desa, kecamatan, bahkan hingga luar Kabupaten Batang. Melihat peluang besarnya kunjungan wisatawan yang datang silih berganti dalam setiap harinya, para pemuda kemudian berinisiatif menjadikan rumah pohon sebagai salah satu obyek wisata alternatif di Kabupaten Batang. Pelan namun pasti, berbagai fasilitas pendukung pun disediakan, mulai dari akses jalan, area parkir, layanan MCK, kios-kios atau warung, dan fasilitas wisata lainnya seperti gazebo, gubuk, tempat duduk, dan lain-lain. Dalam satu bulan, keuntungan dari penjualan tiket masuk dan parkir kendaraan dapat terkumpul pemasukan antara 30-50 juta.

Kegiatan pemetaan spasial dan sosial yang dilakukan tim desa tentu saja bukan tanpa halangan. Setidaknya muncul beragam kecurigaan dari berbagai pihak. Desas desus yang



beredar di masyarakat, pihak Perhutani dan PTPN tidak merespon dengan baik terhadap kegiatan pemetaan, bahkan cenderung menilai secara negatif. Entah terkait atau tidak dengan pemetaan, pasca selesainya kegiatan pemetaan tersiar kabar bahwa padepokan Sapto Wening yang ada di Desa Tombo didatangi polisi karena dianggap telah tersusupi gerakan terorisme. Padepokan Sapto Wening Desa Tombo sebenarnya hanya tempat berdzikir seperti lazimnya kegiatan berdzikir pada umumnya. Beberapa orang sempat dimintai keterangan oleh

kepolisian di rumah lurah. Salah satu diantara yang dimintai keterangan itu adalah Waris (Koordinator Tim Pemetaan Spasial). Waris dimintai keterangan oleh polisi terkait aktivitasnya di padepokan tersebut. Menurut penuturan Waris, “padepokan sapto wening” hanyalah nama yang diberikan para pengikut tarekat Syattariyah terhadap gubug yang ada di tengah hutan tersebut. Waris tercatat sebagai salah satu anggota pengikut tarekat Syattariyah dan memang dirinya sering berdzikir di tempat itu. Dijelaskan kepada para polisi yang memintai keterangan bahwa padepokan itu sama sekali tidak terkait dengan gerakan terorisme, hanya tempat berdzikir bagi para pengikut Syattariyah. Pemilihan lokasi gubug di tengah hutan semata-mata hanya untuk kekhusyukkan, dan itu pun sudah diketahui secara luas oleh masyarakat Desa Tombo. Waris sempat menduga bahwa peristiwa ini tidak bisa dipisahkan dengan kegiatan diskusi, gerakan dan pemetaan yang ia lakukan. Sampai kini motif kedatangan polisi “menggerebek” gubug di tengah hutan pinus tetap menjadi teka-teki para aktivis desa.

Idealnya, hasil-hasil pemetaan harus dijadikan sebagai basis data di dalam menyusun perencanaan desa baik jangka pendek, menengah maupun panjang. Namun, patut disayangkan, hasil pemetaan tersebut hanya berakhir di komputer dan buku *Desa Tombo Dalam Angka Tahun 2015*. Mengenai hal ini, K. Syakur menjelaskan:

“Kami kecewa dengan sistem birokrasi yang ada di pemerintahan desa yang cenderung lambat di dalam merespon segala aspirasi dan inovasi yang dilakukan pemuda. Mereka sudah bersusah payah menyusun Sistem Informasi Desa (SID) tetapi data-data yang ada tidak digunakan sebagai bahan untuk perencanaan desa”.

Kekecewaan sebagaimana diungkap K. Syakur tentu sangat beralasan. Terlebih lagi, kegiatan pemetaan yang dilakukan di Desa Tombo ini telah mendapat perhatian banyak pihak. Dalam berbagai kesempatan yang diadakan baik di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, bahkan provinsi dan nasional, hasil-hasil kegiatan pemetaan Desa Tombo mendapat apresiasi tinggi dan telah menginspirasi desa-desa lain untuk



melakukan hal yang serupa. Dalam sebuah kesempatan, Waris bahkan sempat menyampaikan langsung buku hasil pemetaan kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia yang saat itu dijabat oleh Marwan Dja'far.

Kekecewaan terbesar tentu saja terletak pada tertanggungkannya usaha-usaha yang lebih konkrit dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Dokumen perencanaan desa merupakan dokumen yang sangat penting bagi masyarakat karena dokumen inilah yang menjadi landasan bagi pemerintah dan stakeholders di dalam menjalankan semua program dan kegiatan pembangunan di desa.

Optimisme warga desa akan terjadinya perubahan besar yang akan membawa kesejahteraan di Desa Tombo seketika lenyap. Pernah suatu ketika, Kutiyoso (44 tahun) berkata:

*“Sesok awak dewek ora kober ngombahi pajero. Ora kober. Saking akehe duit sing dicekel awak dewek. Deloken kae banyu soko mata air, kae isine dolar kabeh, tiap menit mili ora liren-liren”*

*“(Besok kita semua tidak sempat mencuci Pajero [Mobil-red] milik kita. Gak bakalan ada waktu. Hal itu disebabkan karena uang yang kita punyai terlalu banyak. Lihat saja itu air yang keluar dari mata air yang ada di desa kita, itu semua dolar, setiap menit selalu mengalirkan dolar tiada henti)”*.

Ungkapkan Kutiyoso ini terjadi pada awal tahun 2016, tepatnya saat ia bersama pemuda lainnya membuat sebuah bangunan tempat untuk memproduksi air kemasan dari mata air tombo. Saat itu, Bappeda Provinsi Jawa Tengah juga memberi sumbangan seperangkat alat pengemasan air minum. Oleh para pemuda, air kemasan direncanakan menjadi salah satu unit andalan BUMDES Desa Tombo yang nantinya diharapkan dapat menjadi sumber dana utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Usaha dan dukungan yang dilakukan pemerintah desa sebenarnya tergolong bagus. Hal ini terbukti dengan adanya alokasi anggaran untuk pembelian pipa. Hanya saja, di dalam implementasinya, seringkali ditemui adanya hambatan-hambatan psikologis yang merintang jalannya kegiatan. Hambatan psikologis ini terutama disebabkan karena rasa saling curiga terhadap masa depan BUMDES. Tentu ini hal yang sangat disayangkan. Sampai beberapa tahun lamanya BUMDES Desa Tombo mengalami kevakuman. Padahal, keberadaan BUMDES Desa Tombo juga terbilang sebagai BUMDES pioner karena lebih awal didirikan dengan tingkat kejelasan usaha yang sangat tinggi. Beruntung kondisi vakum demikian ini berhasil diatasi. Di tahun 2018 sekarang ini, pemerintah desa telah mengalokasikan dana pembangunan gedung untuk produksi air kemasan yang sebelumnya telah rusak dan habis masa kontraknya. Lokasinya pun sekarang ini menempati tanah desa sehingga tidak rawan akibat habis kontrak lahan. Selain itu, desa juga telah menyediakan peralatan produksi yang kapasitasnya lebih besar dari sebelumnya.

Sampai saat ini, cita-cita memiliki dokumen perencanaan pembangunan desa yang lebih menjamin kesejahteraan masyarakat di Desa Tombo belum bisa diwujudkan. Menurut versi masyarakat, pokok utama dari persoalan ini adalah lemahnya kepemimpinan formal yang ada di desa yang kemudian berimplikasi pada persoalan-persoalan lain, seperti terganggunya komunikasi dan hubungan sosial-psikologis antara masyarakat dengan pemerintah desa, pelambatan pembangunan, dan lain-lain. Cara terbaik yang ditempuh masyarakat adalah dengan bersabar, yaitu menunggu waktu terjadinya suksesi kepemimpinan di masa depan. Pada saat bersamaan, usaha-usaha memperbaiki juga harus tetap dilakukan.





Selain melalui perencanaan pembangunan desa, masyarakat juga membidik aspek strategis lain yaitu perencanaan pengelolaan hutan. Gayung pun bersambut karena usaha tersebut beriringan dengan digulirkannya Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) yang merupakan salah satu agenda kerja pemerintahan Jokowi-JK. Pasca terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No. 39 tahun 2017 tentang Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS), ada dua kelompok masyarakat di Desa Tombo yang ikut berpartisipasi, yaitu kelompok “Tri Rekso Mulyo” dan kelompok “Nusantara”. Usulan pun kemudian mereka ajukan dengan mengacu pada hasil-hasil pemetaan. Dalam dokumen yang diajukan, kelompok “Tri Rekso Mulyo” mengusulkan pengelolaan hutan dengan luasan 350 ha yang pemanfaatannya ditujukan untuk perkebunan rakyat, sementara Kelompok Nusantara mengusulkan luasan sebanyak 60 ha yang pemanfaatannya digunakan untuk hutan lindung. Belum lama ini, usulan itu telah disampaikan ke Kementerian. Lurah Desa Tombo pun termasuk salah satu dari sekian puluh undangan yang diundang Presiden Joko Widodo untuk datang ke Istana Negara.

### Inisiatif Komunitas

Dalam empat tahun terakhir ini, di Desa Tombo juga telah tumbuh kelompok-kelompok masyarakat yang melakukan sejumlah inisiatif untuk mengelola sumberdaya alam. Beberapa kelompok yang menonjol antara lain komunitas As-Salwa Resources Center (ARC) dan GP Ansor.

*Pertama*, As-Salwa Resources Center (ARC) Desa Tombo. ARC adalah sejenis LSM yang didirikan oleh sekelompok pemuda Desa Tombo. Pengurus inti ARC kurang lebih sebanyak 10 orang. Hal yang menarik dari ARC, bahwa mereka aktif



di dalam melakukan pendampingan terhadap para petani kopi yang ada di Batang dan Pekalongan. Pendampingan yang mereka lakukan tidak hanya terbatas pada peningkatan kapasitas petani dalam hal budidaya, melainkan juga advokasi dan jaringan pemasaran. Hasil pendampingan yang mereka lakukan antara lain berhasil meningkatkan produktivitas kopi dari semula berkisar antara 400-500 kg/ha menjadi 600-700 kg/ha. Sayangnya, belum semua areal kopi di desa berhasil ditingkatkan produktivitasnya baik karena kendala ARC sendiri maupun dari para petani yang di dampingi. Dari aspek harga jual, ARC juga telah berhasil meningkatkan harga jual kopi dari



kisaran Rp. 15.000 hingga Rp. 20.000 perkilogram untuk kopi jenis robusta menjadi Rp. 25.000 hingga Rp. 30.000 perkilogram. Adapun untuk Arabica berhasil ditingkatkan dari kisaran Rp. 30.000 – Rp. 40.000 perkilogram menjadi Rp. 45.000 – Rp. 50.000 perkilogram. Peningkatan harga jual ini disebabkan karena kualitas pasca panen kopi semakin baik. Di samping itu, ARC juga menjadi semacam “lumbung kopi desa” yang berfungsi menstabilkan harga kopi di tingkat petani. Untuk menjualnya, ARC juga tidak melempar ke pabrikan melainkan cukup dengan mendirikan kedai kopi. Keberadaan kedai ini ternyata mampu menyerap stok kopi yang bersumber dari para petani desa. Bahkan, stok kopi yang dijual di kedai kopi seringkali juga mengalami kekurangan. Uniknya, kedai kopi ARC ini lokasinya ada di Desa Tombo sendiri. Justru karena letaknya yang ada di desa inilah keberadaan kedai Tombo Coffee tak pernah sepi dari pengunjung. Di kedai ini pengunjung dimanjakan dengan pemandangan indah pegunungan dan suasana pedesaan. Dalam satu bulan, kedai Tombo Coffee mampu meraup omzet antara 35-50 juta.

Keberadaan kedai Tombo Coffee yang lokasinya berada di Desa Tombo ini rupanya menjadi magnet ekonomi baru di desa. Banyaknya pengunjung yang datang setiap hari ke kedai ini turut membawa efek lain, yaitu tumbuhnya usaha-usaha baru di sekitar kedai. Setidaknya, tercatat bermunculan warung-warung yang tumbuh seiring dengan pesatnya perkembangan kedai Tombo Coffee.

Kedai ini juga menjadi pusat belajar masyarakat mengenai kopi dan pembangunan pedesaan. Tidak sedikit kelompok-kelompok masyarakat dari daerah lain, para pelajar dan mahasiswa, hingga para pejabat dan pengusaha yang sering berkunjung ke kedai Tombo Coffee untuk melakukan berbagai aktivitas baik skala desa, kecamatan, kabupaten, bahkan provinsi dan nasional.

*Kedua*, GP Ansor. Pembentukan organisasi GP Ansor di Desa Tombo belum terlalu lama, sekitar tahun 2013-an. Tetapi, keberadaan organisasi yang berafiliasi ke Nahdlatul Ulama (NU) ini telah memberikan kontribusi yang sangat besar di dalam mengawal perubahan sosial di Desa Tombo. Seperti kegiatan GP Ansor lainnya, GP Ansor Desa Tombo juga sarat dengan kegiatan-kegiatan sosial-keagamaan, antara lain: perayaan hari-hari besar Islam dan nasional, pemberian santunan yatim piatu, kemah bhakti, pengkaderan, kewirausahaan, dan lain-lain. Ada dua catatan penting di sini. *Pertama*, kegiatan-kegiatan tersebut sarat dengan penguatan militansi kader, jiwa nasionalisme, kemandirian dan kritisisme. Inilah yang barangkali jarang atau tidak dimiliki oleh organisasi serupa di





daerah lain. Sebagai contoh, kegiatan *tracking* batas desa (berjalan kaki mengelilingi hutan, areal perkebunan dan pemukiman) sebagai bagian dari kegiatan pemetaan spasial dihayati oleh mereka sebagai “jihad bela desa”. Dalam pandangan mereka, tak boleh ada sejenkal tanah pun yang tidak dikuasai masyarakat. Masyarakat harus berdaulat dan berdaya. Mereka sedikit pun tidak akan rela jika sumberdaya alam yang ada di desa dikuasai oleh pihak-pihak yang kepentingan utamanya adalah pemupukan modal dan pemiskinan masyarakat. Hal ini bukan sekadar retorika karena dalam praktiknya sudah berulang kali sumberdaya alam milik desa terancam dalam penguasaan pihak lain. Kasus paling menonjol adalah penolakan terhadap perusahaan air mineral dan energi panas bumi yang hendak menguasai sumberdaya alam yang ada di desa. Selain itu, mereka juga memiliki keprihatinan dan perhatian besar terhadap kelestarian alam. Atas keprihatinan ini mereka intensif melaksanakan kegiatan konservasi lingkungan dan kesiap-siagaan bencana. Berbagai kegiatan mereka gelar, antara lain: penanaman vegetasi konservasi di areal perhutanan, pengelolaan sampah, pengawasan kebersihan sungai dari pencemaran, sistem pertanian organik, dan lain-lain. Di bidang kebencanaan, GP Ansor Desa Tombo juga tergolong sangat luar biasa baik. Mereka bekerjasama dengan BNPB dalam banyak penangan kebencanaan antara lain: banjir rob pekalongan, banjir di pegunungan Dieng, ledakan gas alam di Dieng, longsong di Banjarnegara, rumah ambruk karena angin puting beliung, pohon tumbang, dan lain-lain. Yang terbaru mereka juga terlibat dalam aksi kemanusiaan di Lombok (gempa) dan Palu



(gempa, tsunami dan likuifaksi). Tak heran, jika GP Ansor Desa Tombo merupakan salah satu GP Ansor teladan, tidak hanya di tingkat kabupaten melainkan juga tingkat provinsi. Pernah suatu waktu, di tahun 2016, puncak kegiatan Kemah Bhakti GP Ansor Jawa Tengah dipusatkan di Desa Tombo.

Catatan kedua mengenai GP Ansor, bahwa organisasi ini rupanya menjadi simpul dari seluruh elemen pergerakan sosial yang ada di Desa Tombo. Seluruh aktivis desa mayoritas adalah pengurus dan anggota organisasi ini. Mereka tersebar di berbagai organisasi yang ada di desa, mulai dari lembaga pendidikan (pesantren, madrasah, MTs, TPQ), lembaga keagamaan (masjid dan musholla), kelompok seni dan budaya, kelompok tani, kelompok pemuda, kelompok wirausaha, dan lain-lain. Di Ansor mereka berkumpul dan mendapat pendidikan militansi kader, wawasan kebangsaan/nasionalisme, kritisisme dan kemandirian. Banyak keputusan-keputusan strategis lahir dari organisasi ini mengenai berbagai masalah yang ada di desa. Organisasi ini pula giat memasok ide-ide inovasi untuk perbaikan kualitas kehidupan masyarakat desa ke depan. Poros dari semua kegiatan itu ada pada kegiatan rutin *muludan* yang dilaksanakan setiap malam Ahad di Pesantren Al-Fadlu pimpinan K. Syakur. Di tempat inilah mereka berkumpul membahas segala persoalan-persoalan yang terjadi di desa, melakukan refleksi dan evaluasi, menyusun agenda-agenda strategis serta bentuk-bentuk kegiatan yang harus dilakukan.

### **Islam dan Keadilan Sosial: Ancangan ke Arah Tasawuf-Transformatif**

Gerakan sosial di Desa Tombo adalah sebetuk pergerakan yang dimotori oleh kaum santri, terutama mereka yang terhimpun di dalam organisasi GP. Ansor sebagaimana telah disebut di atas. Sumber-sumber nilai yang dijadikan dasar atau landasan pergerakan mereka

adalah Islam Ahlussunnah Wal-Jamaah. Menarik untuk dicatat bahwa pengurus dan anggota GP. Ansor Desa Tombo banyak yang tercatat sebagai pengikut atau pengamal tarekat. Setidaknya, ada lima lima macam gerakan tarekat yang diikuti oleh mereka, yaitu Syattariyah, Naqsyabandiyah, Syadziliyah, Qodiriyah Wa Naqsyabandiyah, dan Alawiyyah. Meskipun berbeda doktrin dan amalan tetapi mereka memiliki visi yang sama dalam membangun desa, yaitu kesejahteraan yang dilandaskan pada nilai-nilai keadilan.

Tulisan ini tidak akan menjelaskan bagaimana ajaran masing-masing tarekat di Desa Tombo dalam memandang persoalan pengelolaan sumberdaya alam. Penjelasan semacam ini belum digali secara baik. Hal yang bisa dijelaskan di sini adalah bagaimana mereka memahami persoalan pengelolaan sumberdaya alam ditinjau dari doktrin-doktrin Islam dan tasawuf secara umum.

Kaum santri di Desa Tombo bukanlah orang-orang yang mengamalkan ajaran Islam untuk keselamatan individual (*individual salvation*). Keislaman jenis seperti itu, menurut K. Syakur, sama sekali tidak akan menyelesaikan masalah yang dihadapi umat dan lingkungannya, bahkan sebaliknya dapat menyebabkan agama kehilangan elan vitalnya. Agama hanya menjadi pemanis di mimbar-mimbar khutbah tetapi sunyi makna; agama menjadi pelo di hadapan ketidakadilan. Jika hal ini yang terjadi maka agama lambat laun akan menjadi barang komoditas untuk melanggengkan posisi kaum elit. Di Desa Tombo, agamawan (kyai atau ulama) yang seperti itu disebut dengan sebutan “Kyai Telor”. Kyai jenis ini absen dari upaya-upaya melakukan pembelaan terhadap rakyat yang terpinggirkan karena hal itu tidak akan menguntungkannya. Berkebalikan dengan itu, menurut K. Syakur, ulama harus hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Agamawan harus peka dan berjuang terhadap segala ketidakadilan. Dalam istilah Moeslim Abdurrahman, agama sudah seharusnya menjadi garda depan di dalam mempertanyakan sistem pencarian hidup yang berkeadilan.<sup>8</sup>



Pandangan semacam ini muncul dari adanya dialog yang intens antara pemahaman mereka mengenai doktrin-doktrin Islam dengan realitas sosial yang mereka hadapi sehari-hari. Fakta hidup melarat yang dialami masyarakat Desa Tombo harus mampu dijawab oleh Islam. Mereka menolak kemelaratan sebagai suatu taqdir. Mereka lebih memandang persoalan kemiskinan dari sebab-sebabnya yang struktural, yaitu adanya tata kelola hutan yang tidak adil. Fakta ketidakadilan menyebabkan kemelaratan mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. “Ketidakadilan inilah yang menjadi sebab suatu tatanan kehidupan masyarakat dapat berkualitas atau tidak”, papar K. Syakur di suatu kesempatan. Karena itu, doktrin mengenai keadilan menjadi tema sentral di dalam semua gerak perubahan yang mereka lakukan.

Menurut mereka, selama pengelolaan sumberdaya alam didasarkan pada asas keserakahan maka selama itu pula ketidakadilan akan langgeng. Jalan terbaik menghadapi mental serakah yang menjadi ciri khas manusia modern-kapitalistik seperti itu, menurut mereka, bisa diatasi dengan cara zuhud sosial. Di sini, zuhud diartikan sebagai laku

<sup>8</sup>Moeslim Abdurrahman, *Islam Transformatif* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), hlm. 5.

meninggalkan kemewahan dunia untuk kesejahteraan bersama. Zuhud semacam ini diyakini akan dapat menghentikan keserakahan di satu sisi, namun bisa mendorong kesejahteraan bersama di sisi lain. Dengan kata lain ada semacam keseimbangan antara rasionalitas-materialistis di satu sisi dengan nativisme-spiritual di sisi lain.

Alam beserta isinya, menurut mereka, adalah sarana-sarana dan sumber-sumber untuk mencapai *ma'rifatullah*. Semuanya tunduk dan bertasbih kepada Allah SWT, sang penguasa jagat raya. Karena itu, keselamatan kehidupan juga harus meliputi keselamatan lingkungan, tidak melulu keselamatan manusia baik individual maupun sosial. Alam beserta isinya, menurut para pemuda GP. Anshor, adalah anugerah Tuhan yang harus dirawat dan dilestarikan. Pandangan semacam ini, menurut Ali Rohman (ustadz dan imam masjid, 37 tahun), merupakan bentuk syukur manusia kepada Tuhan. Alam tak sepatutnya dirusak. Pengrusakan terhadap alam akan berakibat fatal, yaitu mengakibatkan rusaknya kehidupan, dan itu menunjukkan rendahnya kualitas akhlaq seseorang.

Dengan melestarikan dan mengelola alam secara baik, maka manusia pun akan mendapat imbalan dari alam berupa kesejahteraan. Jangankan manusia, sesama alam pun



akan saling berbagi kebaikan jika di antara mereka saling berbuat baik. Inilah yang disebut dengan keseimbangan ekosistem kehidupan. Jadi, sesama alam saling bersaudara. Manusia juga harus bersaudara dengan alam. Caranya adalah dengan menjaga dan melestarikan alam.

Sebagai sarana *ma'rifatullah*, alam dapat menjadi pusat belajar memahami realitas yang tidak tampak kasat mata, yaitu Tuhan. Sebaliknya, dzikir-dzikir membesarkan dzat-Nya juga harus

dikontekstualisasikan dengan dunia realitas, yaitu alam semesta beserta isinya. Dengan demikian, menurut mereka, *mujahadah* dan *riyadloh* haruslah diorientasikan kepada keseimbangan antara yang tampak dan tidak tampak untuk mencapai *ma'rifatullah*. Selama proses itu dijalani maka selama itu pula seseorang harus memiliki tekad yang kuat, disiplin, sabar dan istiqomah dengan akhlak yang baik terhadap siapa dan apa saja sebagaimana yang terdapat dalam maqâmât dan *ahwal* yang harus ditempuh seorang para *salik*.

Dalam mengatasi persoalan kehidupan sosial, *mujahadah* dan *riyadloh* saja tidaklah cukup. Artinya, kesadaran yang terbangun itu harus diwujudkan dalam bentuk yang lebih konkret, yaitu berupa jihad dan ijtihad. Dimaksudkan dengan jihad di sini adalah tindakan-tindakan sosial nyata yang dapat membawa keluhuran manusia baik di dunia maupun akhirat. Ada banyak lapangan jihad yang bisa dilakukan manusia. Titik utama jihad, menurut mereka, adalah ketidakadilan. Aksi blokade masyarakat desa terhadap laju truk-truk bermuatan berat yang merusak jalan desa, penolakan mereka terhadap eksploitasi sumber mata air untuk diperdagangkan demi adanya keuntungan yang dinikmati hanya oleh segelintir orang, pengawasan dan penindakan terhadap perusak alam, transparansi, demokratisasi dan semacamnya bagi mereka merupakan bentuk-bentuk jihad. Dengan kata lain, makna jihad bagi mereka adalah tindakan-tindakan sosial-politik untuk mengangkat harkat dan martabat kemanusiaan. Menurut mereka sabar dan tawakkal bukanlah bersikap



pasif menerima apa yang sedang dialami melainkan juga aktif mengubah keadaan. Hal ini juga selaras dengan doktrin syukur yang meniscayakan adanya tindakan, tidak semata-mata diucapkan secara lisan. Adapun dimaksud dengan ijtihad di sini, menurut mereka, adalah upaya sungguh-sungguh mengatasi masalah sosial dan mencari solusi pemecahannya berdasarkan pemikiran dan argumen yang bisa dipertanggung jawabkan. Tak heran jika mereka aktif melakukan berbagai riset sosial dan riset lainnya sebagai sarana untuk membangun dan memproduksi pengetahuan keumatan.

### Peran Pihak Luar

Gerakan transformasi sosial yang terjadi di Desa Tombo tidak bisa dipisahkan dari adanya riset kolaboratif antara masyarakat desa dengan beberapa pihak, antara lain dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Melalui riset kolaboratif dengan kedua perguruan tinggi ini pula masyarakat kemudian bersentuhan lebih intens dengan berbagai pemikiran alternatif dan jalinan kerjasama dengan pihak-pihak yang lebih luas.

Riset kolaboratif IPB dengan masyarakat Desa Tombo terjadi pada tahun 2001. Tema yang diangkat saat itu pengelolaan hutan bersama masyarakat dalam kerangka pemberlakuan UU Otonomi Daerah, bersama-sama dengan Yayasan Jeram dan Mitra Dieng). Hasil dari kegiatan riset kolaboratif berupa dokumen yang disebut dengan “Rencana Detil Kelola Hutan (RDKH)” Desa Tombo.



Adapun riset kolaboratif yang dilaksanakan IAIN Pekalongan bersama masyarakat Desa Tombo terjadi di awal tahun 2015. Tema yang diangkat adalah perencanaan desa berdaulat dalam kerangka UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berbeda dengan riset sebelumnya yang dilakukan IPB, riset kali ini memiliki ruang lingkup yang lebih luas. Artinya, tidak hanya dalam ranah pengelolaan hutan saja melainkan semua hal yang terkait dengan kehidupan masyarakat desa. Sayangnya, riset kolaboratif ini belum menghasilkan dokumen perencanaan desa sebagaimana yang dicita-citakan bersama. Penyebab utamanya adalah lemahnya kepemimpinan formal di desa dan jalinan komunikasi yang kurang baik antara pemerintah desa dengan masyarakat. Sebagai gantinya, aksi-aksi kolaboratif yang dilakukan adalah penguatan komunitas-komunitas yang ada di desa, baik secara kelembagaan maupun kapasitas. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2017, pemerintahan



Jokowi-JK meluncurkan program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS). Momentum ini tidak disia-siakan oleh masyarakat di bawah kebijakan pemerintah desa. Perkembangan ini menunjukkan adanya kemajuan mengenai hubungan pemerintah desa dengan masyarakat di satu sisi, dan dijadikan database desa atau SID sebagai basis data

dalam perencanaan RAPS. Hingga kini, IAIN Pekalongan masih melakukan pendampingan lanjutan baik terhadap komunitas-komunitas yang ada di Desa Tombo maupun terhadap

pemerintah desa. Dalam melaksanakan riset dan advokasi kebijakan tersebut, IAIN Pekalongan bekerjasama juga dengan Laskar Batang, LPTP Surakarta, dan Insist Yogyakarta.

### **Penutup**

Sumberdaya alam, seberapa pun kecilnya, haruslah dikelola secara adil dan berkelanjutan. Lebih-lebih jika sumberdaya alam tersebut sangat melimpah ruah. Pengelolaan sumberdaya alam harus memperhatikan dua prinsip utama, yaitu keadilan dan berkelanjutan. Dengan segala kekurangannya, pengelolaan sumberdaya alam yang ada di Desa Tombo sudah selayaknya bisa dijadikan sebagai pengalaman berharga bagi desa-desa lain.